

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995).
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH UNILA, 1996).
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- De Haan P. et.al. *Bestuurech in de Sociale Rechtsstaat*, (Kluwer-Deventer: Deel. L, Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium, 1986).
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Emmy Yuhassarie, Tri Harnowo, *Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, (Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009).
- Friedman, Lawrence M., *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967).
- Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009).
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
- Haidir Rachman, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bekasi: CV. Intelektual Writer, 2021).
- Harold H. Titus et al, *Living Issues In Philosophy*, Alih Bahasa H.M Rasyid, *Persoalan Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018).

- I Wayan Wesna Astara, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*, (Denpasar: Warmadewa University Press, 2018).
- Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).
- Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016).
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2006).
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pelangi Cendekia Jakarta, 2007).
- John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, (New York: Oxford University Press, 1999).
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).
- M. Tanzil Aziez, dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1977).
- Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000).
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim dalam Widayati, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983).

- Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Medinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970).
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind. Hill Co., 1989).
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1986).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Study tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- _____. *Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, (Jakarta: UI Press, 2013).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Sopnar Maru Hutagalung, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Tangerang: Tangerang Pustaka Mandiri, 2018).
- Sri Sumantri dalam Widayati, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1974).
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

_____. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010).

Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law*, (Bandung: Alumni, 1976).

Suparji, *Kepailitan*, (Jakarta: UAI Press, 2018).

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012).

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014).

Valerie Selvie Sinaga (ed), *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, 2005).

Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Unissula Press, 2016).

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Disertasi:

I Made Pasek Diantha, “Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, *Disertasi* Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Marcus Lukman, “Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional”, *Disertasi* Universitas Padjajaran, Bandung, 1997.

Tesis:

Heni Astuti, “Perjanjian Hutang Piutang Perorangan Menggunakan Jaminan Sertifikat Yang Diikat Akta Jual Beli Di Kabupaten Kendal”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Jurnal:

Adi Satrio, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal, “Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor”, *Ganesha Law Review* Volume 2 Issue 1, May 2020
Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.

Herry Anto Simanjuntak, “Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditor”, *Justiqa*, Vol.02, No. 02, Oktober 2020.

Jihan Amalia, “Urgensi Implementasi *Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency* Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, “Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5 No. 2, 2019.

Makalah:

Mochtar Kusumaatmadja, “Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang”, *Makalah*, Jakarta, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076).

Putusan Peradilan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 PK/PDT.SUS-PAILIT/2016.

Wawancara:

Alfin Sulaiman, S.H., M.H. selaku Founder of Arkananta Vennotschap, Ketua Umum DPC AAI ON Jakarta Selatan, Ketua Umum Restructuring and Insolvency Chambers Indonesia pada tanggal 5 Juli 2023.

Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M., selaku Partner di Altruist Lawyers, Ketua Bidang Organisasi DPC AAI ON Jakarta Selatan, Sekretaris di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) bidang hubungan internasional pada tanggal 5 Juli 2023.

Jamaslin James Purba, S.H., M.H., selaku Managing Partner di James Purba & Partners, Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ahli dalam Hukum Kepailitan pada tanggal 6 Juli 2023.

Robert, S.H., M.Hum., selaku Mantan Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juli 2023.

Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF, CIP, MCIArb, selaku Founder of Ricardo Simanjuntak & Partners pada tanggal 6 Juli 2023.

